

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA SEKITAR TESSO NILO

Di dalam peta wilayah Provinsi Riau antara lain dapat ditemukan adanya dua buah sungai bernama Sungai Tesso dan Sungai Nilo yang melintasi empat daerah kabupaten yakni Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi, tepat di bagian inti dan masing-masingnya membelah di bagian tengah wilayah Riau ibaratkan jantungnya provinsi ini. Kedua sungai ini hingga sekarang masih dikitari kawasan hutan alam paru-paru penghasil oksigen terpenting dari kawasan hutan tropis dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatra. Secara hidrologis, kedua sungai ini juga memiliki fungsi tata air yang penting sebagai kawasan tangkapan air dan menjadi kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terpisahkan dengan Sub-DAS Kampar DAS Indragiri Rokan.

Bagi kalangan komunitas peneliti dan praktisi konservasi, kawasan sekitar Sungai Tesso dan Sungai Nilo ini kemudian lebih populer disebut dengan nama kawasan hutan Tesso Nilo dan sejak Tahun 2004 telah dikukuhkan pula secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

#### 4.1 Letak Administratif dan Sebaran Desa

Menurut pembagian wilayah administratif, 22 desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo ini tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu: Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi. Menurut pembagian wilayah Kecamatannya, Desa-desa ini terbagi lagi ke dalam 9 Kecamatan, masing-masing 3 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 1 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2 Kecamatan di Kabupaten Kampar dan 3 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara terperinci daftar desa sekitar TNTN menurut pembagian wilayah administratif kecamatan dan kabupaten yang menaungi selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Nama Desa Sekitar TNTN Menurut Pembagian Wilayah Administratif**

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Pelalawan	Langgam	1. Pangkalan Gondai
	Langgam	2. Segati
	Pangkalan Kuras	3. Kesuma/Sei Medang
	Ukui	4. Lubuk Kembang Bunga
	Ukui	5. Air Hitam
Indragiri Hulu	Pasir Penyu	6. Pontian Mekar
	Pasir Penyu	7. Tasik Juang
	Pasir Penyu	8. Sei. Beras-beras
	Kelayang	9. Air Putih
Kampar	Kampar Kiri	10. Gunung Sari
	Kampar Kiri	11. Suka Makmur
	Kampar Kiri	12. Gunung Sahilan
	Kampar Kiri Hilir	13. Rantau Kasih
	Kuantan Hilir	14. Gunung Melintang
	Logas Tanah Darat	15. Situgal
	Logas Tanah Darat	16. Rambahan
Kuantan Singingi	Logas Tanah Darat	17. Perhentian Luas
	Logas Tanah Darat	18. Giri Sako
	Logas Tanah Darat	19. Lubuk Kebun
	Logas Tanah Darat	20. Hulu Tesso
	Logas Tanah Darat	21. Logas Tanah Darat
	Singingi Hilir	22. Suka Maju

*Sumber: WWF Riau, 2015*

Pengidentifikasi 22 desa sekitar TNTN ini tidak terlepas dari langkah yang lebih awal dilakukan WWF Indonesia, Ada 3 kriteria yang digunakan sebagai acuan penentuan desa-desa perbatasan TNTN ini, yaitu:

- 1) Letak geografis desa dekat/berdekatan dengan kawasan TNTN dan kawasan yang masih diusulkan untuk menjadi kawasan perluasan TNTN,
- 2) Desa sering mengalami gangguan serangan gajah, dan
- 3) Desa memiliki hak ulayat di kawasan TNTN dan kawasan yang masih diusulkan untuk menjadi kawasan perluasan TNTN.

#### **4.2 Tipologi Desa dan Keadaan Demografi**

Secara demografis, desa-desa sekitar kawasan TNTN ini dapat dibagi ke dalam 3 tipologi desa, yakni: desa asli, desa transmigrasi dan desa campuran (*mix*).

*Pertama*, tipologi desa asli dengan ciri-ciri utamanya mayoritas penduduk desa adalah penduduk tempatan atau penduduk asal setempat yang mengklaim diri secara umum bersuku bangsa Melayu Riau. Sebagian besar desa bertipologi ini merupakan desa-desa dengan sejarah pembentukan desanya lebih tua atau lebih dahulu dibandingkan dua kategori desa yang lainnya. Namun demikian ditemukan juga adanya desa-desa asli dengan riwayat pembentukannya relatif baru sebagai hasil ekspansi penerukaan penduduk tempatan.

*Kedua*, tipologi desa transmigrasi dengan ciri-ciri utamanya mayoritas penduduk desa terdiri dari warga transmigran asal Pulau Jawa. Sebagai desa yang dibentuk secara resmi menjadi desa permanen dengan sendirinya warga desa-desa transmigrasi ini juga telah menjadi penduduk permanen di daerah ini dari hasil program nasional transmigrasi sejak tahun 1970an. Umumnya keluarga kaum transmigran asal Pulau Jawa di daerah ini kini telah terdiri atas 2-3 generasi.

*Ketiga*, tipologi desa campuran (*mix*) dengan ciri-ciri utama komposisi penduduknya terdiri atas beragam latar belakang suku bangsa yang merupakan campuran antara penduduk yang berasal dari desa-desa asli sekitarnya dan penduduk pendatang yang berasal dari daerah seprovinsi dan dari luar provinsi Riau. Selain penduduk asal Melayu Riau, di perdesaan ini dapat ditemui juga warga suku bangsa lainnya seperti Batak, Jawa, Nias, Minangkabau dan lain-lain. Desa-desa tipologi ketiga ini umumnya berdiri lebih akhir dibandingkan desa-desa dari kedua tipologi desa lainnya. Desa-desa campuran ini umumnya berdiri melalui proses transmigrasi swakarsa yang mengikuti berlangsungnya pembukaan hutan dan lahan yang telah meningkat sangat pesat di kawasan ini di era akhir tahun 1970an dan 1980an. Dapat dipastikan bahwa pendirian desa-desa ini terkait erat dengan hadirnya aktivitas-aktivitas akumulasi kapital skala besar yang diselenggarakan kontraktor-kontraktor HPH, perkebunan kelapa sawit, HTI dan pengembangan industri *pulp*, serta tidak terkecuali juga karena adanya program transmigrasi resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional.

Menurut data BPS (2014) desa-desa sekitar TNTN ini didiami oleh lebih dari 41.181 jiwa penduduk yang terdiri dari 9.775 KK. Adapun gambaran

terperinci mengenai jumlah penduduk di 22 desa sekitar TNTN ini dapat dilihat dari Tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah KK di Desa-Desa Sekitar TNTN**

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
Pelalawan	Langgam	1. Pangkalan Gondai	2.114	497
		2. Segati	1.918	460
	Pangkalan Kuras	3. Kesuma/Sei Medang	1.515	341
		4. Lubuk Kembang Bunga	1.792	392
Indragiri Hulu	Ukui	5. Air Hitam	2.022	484
	Pasir Penyu	6. Pontian Mekar	1.796	476
	Pasir Penyu	7. Tasik Juang	1.239	272
	Pasir Penyu	8. Sei. Beras-beras	1.633	392
	Kelayang	9. Air Putih	3.963	963
Kampar	Kampar Kiri	10. Gunung Sari	3.977	844
	Kampar Kiri	11. Suka Makmur	2.851	709
	Kampar Kiri	12. Gunung Sahilan	1.569	325
	Kampar Kiri Hilir	13. Rantau Kasih	596	146
Kuantan Singingi	Kuantan Hilir	14. Gunung Melintang	2.650	701
	Logas Tanah Darat	15. Situgal	215	51
	Logas Tanah Darat	16. Rambahan	687	160
	Logas Tanah Darat	17. Perhentian Luas	2.056	463
	Logas Tanah Darat	18. Giri Sako	1.921	480
	Logas Tanah Darat	19. Lubuk Kebun	364	96
	Logas Tanah Darat	20. Hulu Tesso	1.284	311
	Logas Tanah Darat	21. Logas Tanah Darat	569	139
	Singingi Hilir	22. Suka Maju	4.450	1.073
	<b>JUMLAH</b>			<b>41.181</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Gambaran data penduduk yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk antar desa bervariasi besarnya dan secara umum menunjukkan proporsi seimbang antara jumlah penduduk asli dan penduduk pendatang. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah ini sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh faktor tingginya tingkat migrasi penduduk pendatang dibandingkan pertumbuhan alamiah dari penduduk asal di daerah ini sendiri.

Adapun keadaan sumber daya manusia di desa-desa sekitar TNTN dapat dikatakan masih memprihatinkan sehingga perlu perhatian dan terobosan untuk mengatasinya. Dari sumber resmi kependudukan tingkat provinsi yang tersedia di

BPS (2014) ditunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa-desa sekitar TNTN ini tergolong rendah dengan ciri-ciri mayoritas penduduk maupun Kepala Keluarga di desa-desa ini hanya berpendidikan terakhir tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar.

Sebagian besar penduduk desa sekitar hutan Tesso Nilo mata pencahariannya bergerak dalam sektor pertanian perdesaan. Pertanian tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit serta mencari kayu ke kawasan hutan masih merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo. Sebagian kecil masyarakat seperti di Desa Gunung Sahilan dan Rantau Kasih di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Hulu Tesso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan desa-desa di pinggiran sungai lainnya juga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan mencari ikan di sungai-sungai utama di sekitar permukiman mereka. Kegiatan berternak sapi dan kerbau serta memelihara ayam juga dijumpai di sejumlah desa, tetapi umumnya masih kurang berkembang. Cara berternak sapi misalnya secara umum masih dilakukan dengan sistem dilepas dan biasanya memang belum dijadikan andalan pendapatan keluarga. Desa Perhentian Luas, Desa Rambahan, Desa Situgal dan Desa Logas di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui dan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan mengandalkan juga lebah madu sebagai mata pencaharian sampingan penduduk. Sementara itu, kehadiran banyaknya perusahaan besar yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan dan industri pengolahan hasil hutan di daerah ini tampaknya belum memberi kontribusi berarti dalam menampung tenaga kerja di sektor jasa dan formal dari kalangan penduduk asal desa-desa sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja lokal mulai dari pekerja buruh harian hingga pekerja terampil dan profesional relatif sangat rendah. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal yang terbesar hanya untuk buruh harian perkebunan, sedangkan untuk tenaga kerja terampil dan profesional di perusahaan sangatlah kecil.

### 4.3 Sistem Organisasi Sosial

Kehidupan masyarakat desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo antara lain juga perlu dipahami dari sudut pandang sosial budaya yang meliputi sistem organisasi sosial tradisional masyarakat desa sekitar kawasan ini. Secara sosio-kultural, khususnya apabila merujuk pada pembagian sosio-kultural masyarakat tempatan, desa-desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo dapat pula dibagi ke dalam dua varian sistem organisasi sosial tradisional. *Pertama*, desa-desa yang secara organisasi sosial dominan mengikuti sistem perbatinan atau dalam istilah setempat biasa juga disebut menganut adat Melayu Petalangan. Desa-desa yang menganut sistem organisasi sosial tradisional seperti ini terutama dapat ditemukan di daerah perdesaan sekitar TNTN di kabupaten Pelalawan dan kabupaten Indragiri hulu, seperti:

1. Desa Pangkalan Gondai
2. Desa Segati
3. Desa Kesuma/Sungai Medang
4. Desa Lubuk Kembang Bunga
5. Desa Air Hitam
6. Desa Pontian Mekar
7. Desa Tasik Juang
8. Desa Sei. Beras-Beras
9. Air Putih

*Kedua*, desa-desa sekitar TNTN yang menganut sistem kepenghuluan dengan sistem organisasi sosial dan kekerabatan yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Minangkabau. Dalam penggolongan sosial-budaya Minangkabau memang dikenal adanya pengkategorian mengenai daerah rantau, yang wilayahnya meliputi beberapa daerah di Provinsi Riau, seperti di kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Dalam hal ini patut dicatat meskipun dinyatakan mendapat pengaruh dari kebudayaan Minangkabau, tetapi pada hakikatnya terdapat cukup banyak juga perbedaan dan kekhasan yang menjadikan sistem kehidupan sosial budaya masyarakat desa-desa ini unik dan tidak dapat digeneralisasi sebagaimana kebudayaan Minangkabau sendiri yang sejatinya juga

bersifat plural. Adapun desa-desa sekitar TNTN yang dominan menganut sistem kepenghuluan ini secara administratif berada di kabupaten Kampar dan kabupaten Kuantan Singingi, seperti:

1. Desa Gunung Melintang
2. Desa Situgal
3. Desa Ramabahan
4. Desa Perhentian luas
5. Desa Giri Sako
6. Desa Lubuk Kebun
7. Desa Hulu Tesso
8. Desa Logas Tanah Darat
9. Desa Suka Maju
10. Desa Gunung Sari
11. Desa Suka Makmur
12. Desa Gunung Sahilan
13. Desa Rantau Kasih

Secara tradisional, baik sistem pebatinan maupun sistem kepenghuluan merupakan kesatuan kelompok masyarakat yang tersusun berdasarkan struktur dan hubungan hubungan kekerabatan. Dari para tetua adat disebutkan bahwa terdapat perbedaan sistem adat antara kedua masyarakat yang menganut sistem organisasi sosial ini. Perbedaan itu terutama terlihat dalam pola kepemimpinan pada sistem pebatinan yang dinyatakan lebih bersifat otokrasi dengan undang adat “lantak luka”, sedangkan sistem kepenghuluan lebih bersifat demokratis, dengan undang adat “lantak bane”.

Hubungan antara anggota-anggota suku atau kerabat dengan pemimpin tradisional pada masing-masing masyarakat ini dilukiskan bahwa dalam sistem pebatinan agak lebih longgar dibandingkan pada masyarakat yang menganut sistem kepenghuluan. Longgar dalam pengertian lemahnya solidaritas sosial pada tingkat kesatuan komunitas wilayah pebatinan. Solidaritas sosial biasanya masih terpelihara pada tingkat keluarga luas ataupun kesatuan sosial berdasarkan territorial yang terikat oleh kerja sama aktivitas mata pencaharian seperti dalam

pembukaan ladang, berburu dan dalam melawan serangan-serangan dari binatang atau dari warga masyarakat lainnya. Sifat individualistik, sebagai konsekuensi dari pola okupasi yang kurang berkembang (tetap bertahan sebagai petani peladang) dalam masyarakat pebatinan, dalam banyak hal tidak menguntungkan dalam usaha melakukan perbaikan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada masyarakat desa-desa pertalangan yang biasanya hidup lebih di daerah pedalaman terdapat kecenderungan untuk hidup mengelompok berdasarkan ikatan kekerabatan dan memberi corak terhadap pola pembentukan pemukiman. Menurut Parsudi Suparlan (1993), ada beberapa pola pengelompokan tempat tinggal pada masyarakat Melayu yang menganut sistem pebatinan ini seperti ini, seperti: 1) ada kecenderungan memilih tempat tinggal berdekatan dengan orang tua, mertua, saudara sekandung; 2) ada kecenderungan memilih tempat tinggal berdekatan dengan saudara sepupu, saudara angkat, saudara laki-laki dari ibu, saudara-saudara kandung ibu atau bapak; 3) memilih tempat tinggal dengan orang-orang yang berasal dari pebatinan yang sama. Pola seperti ini sampai sekarang juga kami temui di sejumlah desa pertalangan, termasuk di kampung-kampung daerah penerukaan baru yang dipelopori oleh penduduk tempatan di desa-desa sekitar TNTN di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Di desa-desa yang masyarakatnya mengklaim menganut pengaruh kebudayaan matrilineal Minangkabau seperti di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan susunan kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Setiap individu adalah anggota dari kaum dan suku ibunya. Keluarga matrilineal ini tersusun dalam struktur keluarga luas (*extended family*) yang dipimpin oleh ninik mamak. Di antara sesama anggota sekerabat matrilineal ini tidak diperkenankan menjalin tali perkawinan karena melanggar prinsip perkawinan eksogami suku. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar dibandingkan dari praktek-praktek umum adat yang masih berlaku di tanah Minangkabau, misalnya dalam pola kepemilikan komunal, sistem pewarisan dan pola pengambilan keputusan yang di dalam praktek di desa-



desa sekitar Tesso Nilo ini ternyata lebih meniru prinsip-prinsip sistem patrilineal yang secara struktural lebih cenderung menguntungkan posisi kaum laki-laki.

Meskipun terdapat perbedaan ideasional mengenai sistem organisasi sosial dan struktur kepemimpinan tradisional antara sistem pebatinan dengan sistem kepenghuluan, namun di dalam kenyataannya perbedaan ini juga tidaklah selalu menonjol terlihat dalam tataran praktek kehidupan sosial budaya masyarakat desa sekitar kawasan Tesso Nilo. Struktur kepemimpinan tradisional dalam masyarakat yang menganut sistem pebatinan di desa-desa sekitar kawasan Tesso Nilo biasanya terdiri dari: *Batin, Ninik Mamak* dan kepala keluarga inti atau kepala rumah tangga. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kepenghuluan struktur kepemimpinannya terdiri dari atas: *Penghulu, Mamak nan Barompek, Mamak Sako* dan *Tungganai*. Di desa-desa ataupun di kampung-kampung yang menganut sistem pebatinan maupun kepenghuluan terdapat pengelompokan kekerabatan yang disebut *suku*. Nama-nama suku pada kedua sistem ini ternyata juga tidak memperlihatkan banyak perbedaan, seperti pada beberapa desa dengan sistem pebatinan terdapat beberapa nama-nama suku seperti: Melayu, Mandahiling, Palabi dan Piliang. Hanya saja di dalam masyarakat yang menganut sistem kepenghuluan, nama-nama suku ini biasanya lebih banyak, seperti: Mandahiling, Melayu, Kampuang Salapan, Piliang, Pitopang, Melayu Darek, Melayu Kepalo Koto, Domo, Caniago dan lain-lain.

Dalam kenyataannya di banyak desa sekitar kawasan Tesso Nilo pengaruh sistem organisasi sosial dan kepemimpinan tradisional umumnya semakin memudar. Bahkan ada sejumlah desa yang sebenarnya sistem organisasi sosialnya tidak lagi dapat dikategorikan ke dalam kedua sistem organisasi sosial berbasis kebudayaan penduduk tempatan tersebut. Hal ini terutama dapat dijumpai di sebagian besar desa-desa bentukan baru melalui transmigrasi yang diprakarsai pemerintah nasional maupun transmigrasi swakarsa. Desa-desa ini biasanya mayoritas penduduknya adalah warga pendatang. Desa-desa ini meliputi daerah perdesaan sekitar TNTN bertipologi desa transmigrasi dan desa campuran (*mix*), seperti:

1. Desa Pontian Mekar

2. Desa Tasik Juang
3. Desa Sei. Beras-Beras
4. Desa Air Putih
5. Desa Gunung Sari
6. Desa Suka Makmur
7. Desa Giri Sako
8. Desa Hulu Tesso
9. Desa Suka Maju

#### **4.4 Sistem Kepemilikan dan Hak-hak Tradisional atas Tanah**

Sistem pemilikan tanah dalam masyarakat perdesaan sekitar kawasan hutan Tesso Nilo baik yang menganut sistem organisasi sosial pebatinan maupun kepenghuluan bersifat komunal. Menurut klasifikasi beberapa tipe pemilikan tanah yang dikemukakan oleh World Bank, pola penguasaan dan pemilikan tanah seperti ini masih dapat digolongkan ke dalam tipe komunal tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. konsentrasi pemilikan yang rendah – dimana hak kedaulatan berada pada komunitas,
2. pengolahan tanah tidak terpusat dan hak pengelolaan berada pada anggota-anggota kelompok,
3. kesama-rataan sosial ekonomi yang tinggi,
4. produktifitas tenaga kerja rendah,
5. produktifitas tanah rendah,
6. intensitas tenaga kerja rendah,
7. intensitas modal rendah,
8. produksi lebih berorientasi subsistensi, dan
9. struktur jasa dan pelayanan pendukung masih terkebelakang.

Hampir semua informan pemuka adat yang ditemui, menyatakan bahwa seluruh tanah dan hutan Tesso Nilo beserta semua tanaman yang ada di atasnya dikenai hak ulayat milik komunal dari suku ataupun pebatinan yang ada di daerah tersebut. Adapun otoritas tertinggi atas hak ulayat ini, dalam masyarakat yang

menganut sistem pebatinan otoritasnya dipegang oleh Batin sedangkan pada desa-desa yang menganut sistem kepenghulu otoritasnya dipegang oleh Datuk/Penghulu.

Sistem kepemilikan tanah secara komunal tradisional seperti ini sampai sekarang umumnya masih tetap dipertahankan oleh masyarakat tempatan di sekitar kawasan hutan Tesso Nilo. Dalam contoh kasus adanya penebangan pohon sialang (jenis pohon tempat lebah menghasilkan madunya) yang dilakukan oleh pihak perusahaan pemegang HPH, maka suku ulayat pemilik lahan tersebut mengajukan keberatan kepada perusahaan dan menuntut denda ganti rugi sesuai dengan adat yang berlaku. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dan ketika tidak dapat diselesaikan melalui jalur penegakan hukum adat, perkaranya bahkan dilanjutkan hingga ke pengadilan negara. Hasilnya keputusan pengadilan mengabulkan tuntutan komunitas adat, sehingga meskipun perusahaan melakukan penebangan di areal konsesi HPHnya, pihak perusahaan yang melakukan penebangan pohon sialang itu tetap dikenai denda membayar ganti rugi kepada suku pemegang ulayat atas tanah tersebut.

Tetapi, walaupun pengakuan hak ulayat dan kepemilikan komunal atas lahan dan hutan diakui dan tetap dipegang dengan teguh oleh masyarakat tempatan, terdapat pandangan umum bahwa pengaturan penggunaan dan penguasaan atas lahan dan hutan di kawasan ini ternyata relatif longgar. Pada suatu lahan atau hutan yang dimiliki oleh suku atau batin tertentu misalnya, tidak berarti hanya anggota suku atau batin bersangkutan itu saja yang berhak menggunakan dan menguasainya. Anggota dari suku atau batin lain di daerah itu juga dapat meminta dan menerima hak untuk membuka ladang, mengambil kayu, mendirikan rumah, memetik buah-buahan yang ada di dalamnya dan berburu hewan. Urusannya tidaklah rumit, cukup dengan mengurusnya kepada batin, atau datuk, atau penghulu atau ninik mamak pemegang otoritas hak ulayat untuk meminta izin. Dalam kehidupan tradisional dahulunya dikenal adanya syarat *mengisi adat*.

Dengan perkataan lain, ini berarti bahwa adanya pola kepemilikan atas tanah dan hutan oleh batin atau suku tertentu, sifatnya tidak terlalu mengikat

dengan pola penguasaan dan aturan penggunaannya. Apabila telah meminta izin dan mendapat persetujuan dari otoritas pemilik ulayat atau pemimpin suku tertentu, maka tanah beserta tanaman yang ada di atas kalau terus dikelola akan dapat menjadi hak milik individu. Hak kepemilikan atas tanah yang terus diurus ini selanjutnya dapat permanen (sebagai hak milik individu) dan dapat diwariskan pula kepada generasi anak cucu dalam keluarganya. Dengan demikian konsep kepemilikan kumunal atas tanah pada masyarakat desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo ini dapat menjadi jauh lebih luas sebagai faktor internal (*internal factor*) dan sekaligus faktor penekan (*push factor*) yang mendorong laju ekspansi penduduk dan eskalasi okupasi lahan atau hutan.

#### **4.5 Pola Perkampungan**

Secara tradisional, pola permukiman masyarakat asli di desa-desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo terdiri atas perkampungan yang berada di sepanjang aliran sungai dengan tingkat kemiringan  $15^{\circ}$  sampai dengan  $45^{\circ}$ . Aliran sungai memiliki arti penting bagi masyarakat desa di daerah ini terutama karena fungsinya sebagai prasarana transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dan MCK. Penduduk yang tinggal di pinggir sungai, biasanya juga melakukan aktivitas mencari ikan. Di sejumlah desa secara amat terbatas dijumpai pula pemanfaatan aliran sungai sebagai sumber pengairan pertanian sawah. Pertanian padi di daerah ini memang umumnya bersifat tadah hujan dan itupun biasanya diproduksi secara terbatas pada ladang-ladang penduduk yang baru dibuka. Mayoritas penduduk memenuhi kebutuhan pangan beras mereka dengan cara membeli dari pedagang yang mendatangkan beras dari luar daerah ini.

Perkampungan asal di daerah ini biasanya mengelompok berdasarkan hubungan kekerabatan, yang biasanya berjumlah 6 sampai dengan 10 buah rumah yang masing-masing dihuni oleh keluarga-keluarga inti atau dengan tambahan keluarga muda yang masih hidup menumpang dengan orang tua atau mertua mereka karena belum mendirikan rumah sendiri. Kelompok-kelompok permukiman yang tersusun menurut kesatuan suku secara patrilineal maupun matrilineal ini biasanya terdiri dari perumahan dengan luas lahan kurang lebih 500 meter persegi. Jarak dan batas antara rumah yang satu dengan yang lainnya

maupun antara satu kelompok kerabat dengan kerabat lainnya bervariasi sehingga terkesan tidak teratur secara rapi disebabkan biasanya perumahan dibangun dan dikembangkan sesuai keadaan topografi alam di sekitar dengan berorientasi ke arah sungai.

Berdasarkan pengetahuan budaya dan pengalaman adaptasi masyarakat dengan lingkungan alamnya, secara umum masyarakat desa asli sekitar kawasan hutan Tesso Nilo mempunyai sistem kategorisasi penggunaan lahan dan hutan yang ada di lingkungannya atas empat (4) bagian, yaitu: perkampungan, polak, ladang/kebun dan hutan.

*Perkampungan* merupakan kesatuan wilayah pusat konsentrasi penduduk dengan permukiman yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan berbagai aktivitas kehidupan sosial antar keluarga dan antar kelompok komunitas. Perkampungan biasanya juga dijadikan tempat memelihara dan menggembalakan ternak.

*Polak* merupakan kesatuan lahan yang biasanya terletak di sekitar permukiman dan masih menjadi bagian yang menyatu dengan pusat kampung hingga pinggir kampung yang biasanya digunakan untuk menanam tanaman padi, beragam tanaman buah-buahan (kelapa, durian, kuini, pisang, rambutan dan sebagainya) dan tanaman muda lainnya. *Polak* seperti kebun campur yang merupakan bentuk evolusi tertua dari sistem perladangan yang memiliki fungsi penting bagi ekonomi subsistens bagi keluarga dan masyarakat perdesaan.

*Ladang/kebun* merupakan satu kesatuan lahan yang biasanya terletak di pinggiran hingga di luar perkampungan yang digunakan untuk cocok tanam tanaman tua. Bedanya dari polak, di ladang penduduk biasanya melakukan cocok tanam secara monokultur dan mengusahakan *cash crop* sebagai tanaman utamanya yang diandalkan untuk menghasilkan pendapatan uang tunai. Tanaman karet diusahakan oleh penduduk desa sekitar hutan Tesso Nilo sudah lama, sejak generasi kakek dan nenek mereka, ketika pertama kalinya masyarakat di daerah ini berpapasan dengan ekonomi tanaman ekspor dan kapitalisme di jaman pendudukan kolonial Belanda.

Adapun *hutan*, merupakan bagian wilayah hutan alam yang dimiliki secara ulayat (komunal) dan dijadikan sebagai cadangan lahan untuk generasi keturunan hingga masa akan datang. Hutan biasanya juga digunakan penduduk desa untuk tempat mengambil kayu bahan bangunan, bahan membuat sampan untuk transportasi sungai dan tempat mengambil hasil hutan non-kayu seperti madu lebah, getah damar, jelutung, rotan, manau, tabu-tabu, tumbuhan tertentu untuk obat-obatan, serta tempat melakukan kegiatan berburu.

Dalam perkembangannya kemudian, terutama sejak tahun 1980an terjadi perubahan pola permukiman penduduk di beberapa tempat di sekitar kawasan hutan Tesso Nilo. Hal ini terkait langsung dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan hak konsesi kepada perusahaan pemegang HPH dan penetapan beberapa daerah sekitar kawasan ini menjadi desa transmigrasi. Begitu pula seterusnya pembukaan perkebunan-perkebunan kelapa sawit, HTI dan pembangunan industri kayu dan kertas berskala besar di kawasan ini, secara sistematis turut mendorong terjadinya perubahan pola perkampungan di berbagai pelosok desa sekitar kawasan ini.

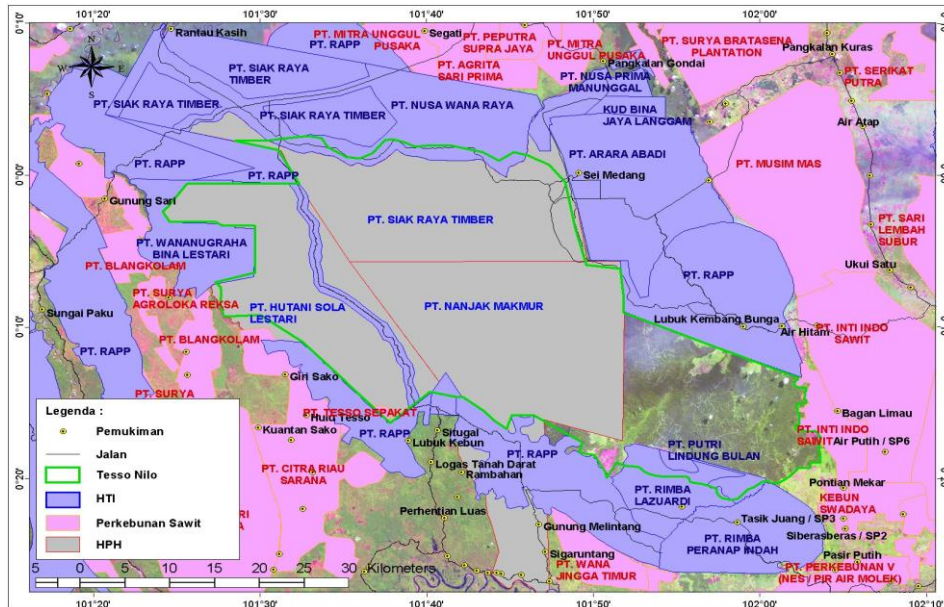
Beberapa desa asli hingga kini memang masih memperlihatkan ciri-ciri perkampungan tradisional. Demikian pula beberapa pemukiman transmigrasi masih tetap mengikuti pola pemukiman di sepanjang aliran sungai. Namun demikian terdapat kecenderungan umum di beberapa desa, terlihat adanya inisiatif masyarakat untuk pindah dari pemukiman lama di sepanjang aliran sungai ke pinggiran jalan yang dapat dilalui oleh alat transportasi darat. Salah seorang pemuka masyarakat menyebutkan alasan pindah dan mendirikan rumah di sepanjang jalan yang dapat dilalui oleh transportasi darat, dengan tujuan agar hubungan transportasi, interaksi dan komunikasi dengan dunia luar dapat lebih mudah dilakukan.

#### **4.6 Pengaruh Kehadiran Perusahaan bagi Masyarakat sekitar Hutan**

Kehadiran perusahaan skala besar penyelenggara aktivitas akumulasi kapital di sektor kehutanan dan perkebunan di Propinsi Riau telah berlangsung sejak lama ditandai masuknya perusahaan pemegang HPH ke daerah ini mulai tahun 1967. Peningkatan yang pesat terlihat nyata sampai akhir tahun 1992, dari

17 buah pada tahun 1974/1975 menjadi 68 buah pada tahun 1991/1992. Dengan begitu luasnya areal konsesi hutan yang dimiliki oleh 68 perusahaan pemegang HPH di Propinsi Riau ketika itu secara langsung telah mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan pada masyarakat desa sekitar yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian dan perhutanan. Kehadiran aktivitas akumulasi kapital bidang kehutanan secara besar-besaran juga telah menimbulkan eksese negatif sebagai akibat dari penebangan hutan, seperti; bencana banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. San Afri Awang (1993: 64) ketika itu mengemukakan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HPH tidak terjadi, hal ini disebabkan karena perusahaan pemegang HPH tidak pernah melarang masyarakat untuk membuka hutan dan mengambil hasil hutan, seperti rotan, kayu gaharu dan madu, di dalam wilayah konsesi perusahaan.

WWF Riau mengidentifikasi ada 9 perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak dekat dengan kawasan hutan Tesso Nilo (termasuk perluasan TNTN). Selain itu terdapat pula sejumlah perusahaan besar lainnya yang bergerak dalam usaha skala besar di bidang kehutanan dan industri pengolahan hasil hutan di sekitar kawasan hutan Tesso Nilo. Perusahaan-perusahaan ini terdiri dari 38 perusahaan pemegang HPH yang meliputi total penguasaan hutan seluas 2.608.208 ha dan dan 20an perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk di antaranya PT. RAPP yang paling populer dikenal oleh masyarakat desa sekitar kawasan ini.



Gambar .4.1. Peta Sebaran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, HPH dan HTI di Sekitar Kawasan Hutan Tesso Nilo

Sumber: WWF Riau, 2015

#### 4.7 Penerimaan Masyarakat Desa terhadap TNTN

Penguatan kawasan hutan Tesso Nilo menjadi taman nasional pada tahun 2004 memberi harapan baru bagi masyarakat desa sekitar. Setidaknya hal ini terlihat dengan adanya komitmen dukungan formal dari 22 desa yang tersebar di sekitarnya. Sejumlah program telah diluncurkan, seperti program konservasi gajah yang terpadu dengan tujuan penanganan gangguan gajah; program penguatan ekonomi keluarga perdesaan yang telah dimulai melalui pembinaan produksi lebah madu dan budidaya ikan di sungai; penguatan masyarakat desa sekitar hutan melalui pembinaan forum masyarakat Tesso Nilo; dan berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan daerah yang berorientasi pelestarian lingkungan.

Penerimaan masyarakat kedua puluh dua desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo terhadap keberadaan TNTN ternyata cukup beragam. Dari berbagai informasi kualitatif yang diperoleh selama penelitian ini diketahui masih relatif rendahnya pengenalan mayoritas masyarakat desa sekitar terhadap TNTN. Sejak TNTN dikukuhkan secara resmi sampai sekarang sosialisasinya sebenarnya belumlah sampai pada berbagai lapisan masyarakat desa sekitar.



Di setiap desa memang ditemukan adanya tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal) yang sudah mengetahui karena mereka beberapa kali pernah terlibat dalam proses perencanaan hingga pengukuhan TNTN. Tetapi di kalangan para tokoh masyarakat itu sendiri terkesan adanya beragam pemahaman dan interpretasi tentang urgensi dan keberadaan TNTN. Sebagian tokoh desa yang hingga kini masih berposisi mendukung program pembangunan TNTN umumnya belum memandang kehadiran kebijakan dan program ini sebagai bagian dari kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakatnya. Pemahaman mereka tentang keberadaan TNTN umumnya juga masih bersifat parsial. Pandangan parsial yang paling umum ditemui adalah adanya anggapan bahwa keberadaan TNTN sebatas kepentingan untuk konservasi gajah. Selain itu, TNTN lebih dipandang sebagai programnya WWF. NGO bertaraf Internasional ini lewat perwakilannya WWF AREAS Riau Project memang dapat dikatakan paling banyak terlibat memprakarsai dan mengimplementasikan pembangunan TNTN. Tetapi bagaimanapun juga posisi organisasi ini sesungguhnya tetaplah sebagai salah satu pihak fasilitator-dinamisator pembangunan TNTN. Oleh sebab itu amatlah keliru apabila masih ditemui juga pejabat/aparat pemerintahan setingkat kabupaten dan provinsi sekalipun yang ikut memandang bahwa TNTN itu adalah milik dan programnya WWF.

Sebagian besar para tokoh masyarakat desa yang kami wawancarai soal pandangannya terhadap kebijakan dan keberadaan TNTN bahkan mulai mengambil posisi ragu dan apatis. Bagi mereka, kebijakan dan tindak lanjut program TNTN dianggap tidak pasti. Hingga sekarang ketidak-pastian ini masih terus berlanjut dan tidak tahu sampai kapan hal ini terus berlangsung. Terlepas dari kompleksnya persoalan yang ada, mereka beranggapan bahwa pemerintah dan pihak-pihak terkait sangat lamban dalam mengambil langkah. Tuntutan kepastian yang mereka butuhkan sebenarnya hanya dua macam. *Pertama*, perlunya segera melakukan pengukuran dan penentuan tapal batas TNTN. Harapan mereka atas hal ini adalah untuk menghambat laju pembukaan hutan oleh perusahaan-perusahaan besar dan warga pendatang. Di samping itu juga terdapat harapan agar jangan sampai penetapan tapal batas TNTN itu memasuki lahan garapan dan sisa hutan ulayat mereka yang selama ini diklaim telah banyak

diambil oleh perusahaan-perusahaan besar di sekitarnya. *Kedua*, perlunya tindak lanjut program yang lebih konkrit dalam rangka upaya perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat perdesaan. Bagi mereka apapun namanya program pembangunan yang diarahkan ke desa, saat ini yang paling mendesak ialah adanya upaya nyata untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Ada pula tokoh masyarakat yang kini sudah terang-terangan mengambil posisi menolak kehadiran TNTN, meskipun semulanya mereka akui ikut mendukung. Di salah satu desa transmigrasi yang dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan serangan gajah, secara resmi pemerintah desanya telah mengajukan surat penolakan. Dalam logika mereka pembangunan TNTN inilah yang telah memicu peningkatan serangan gajah terhadap tanaman penduduk dan manusia. Dalam kalangan warga awam memang tidak ditemukan pro kontra yang tajam dalam menyikapi keberadaan TNTN. Hal ini tampaknya lebih disebabkan karena masih minimnya pengenalan mereka terhadap keberadaan TNTN.